

PERAN DINAS PERIKANAN KOTA BATAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PULAU JALOH MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2021

Salmah

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Salmah062002@gmail.Com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Perikanan Kota Batam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pulau Jaloh Melalui Program KUBE Tahun 2021 dengan mengkaji permasalahan yang terjadi pada bagian pemberdayaan masyarakat nelayan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dinas perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di pulau jaloh. Manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan positif khususnya bagi Dinas Perikanan Kota Batam dalam meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan khususnya Di Pulau Jaloh.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Dinas Perikanan Kota Batam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pulau Jaloh Tahun 2021 berdasarkan ketiga indikator yaitu Regulator, Dinamisator Dan Fasilitator masih belum optimal karena masih terdapat keluhan masyarakat mengenai kurangnya pemberdayaan dari dinas perikanan seperti pelatihan yang dilakukan dari dinas perikanan tidak berkelanjutan, kurangnya bimbingan langsung, serta kurangnya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat nelayan.

Peneliti mengambil kesimpulan mengenai Peran Dinas Perikanan Kota Batam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pulau Jaloh Melalui Program KUBE Tahun 2021 yaitu dari beberapa program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan belum sepenuhnya berjalan dengan sempurna dan harus ada bentuk upaya maupun tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kata kunci ; Peran Dinas Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Program KUBE.

ABSTRACT

This research discusses the role of the Batam City Fishing Service in empowering fishing communities on Jaloh Island through this 2021 KUBE program by examining the problems that occur in this area on empowering fishing communities.

The aim of this research is to find out the roles of the fisheries department in empowering the fishing community on Jaloh Island. The benefits of this research can provide positive input, especially for the Batam City Fisheries Service in increasing empowerment of the fishing community, especially on Jaloh Island. This research uses qualitative research. Informants were selected using a purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the research results, it is known that the role of the Batam City Fishing Service in empowering the Fishing Community on Jaloh Island in 2021 is based on three

indicatrslid, namelyed Reculator, Dinamicator and Fasilitatorring, is still not optimalistic becauseed thire are stioll community complaints regarding the lack of empowerment from the fisheries service, such as the leacking oif training carriding aout bay the fisherieses servicelid. ongoing, lack of direct guidance, and lack of assistmdwgy distributeixjwd to fishing communities.

Researchers draw conclusions regarding the role of the Batam City Fisheries Service in Empowering the Fishing Community on Jaloh Island through the KUBE Porogeeraming in 2021, nemely thattd several porogramis implemmentedid bay this Fisherieding Serviceeing have not fully run perfectly and there must be efforts and actions that must be taken to get results. goals and objectives to be achieved.

Keywords : *he role of the Fisheries Service, Empowerment of Fishing Communities, KUBE Program.*

1. PENDAHULUAN

Kota Batam merupakan bagian dari provinsi kepulauan riau yang dikelilingi laut dan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil tersebut sebagian besar dihuni oleh masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah nelayan tangkap dan budidaya. Sumber daya laut di perairan kota batam terdiri dari berbagai jenis seperti ikan, cumi dan yang lainnya. Sumber daya laut tersebut merupakan salah satu bahan yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat nelayan Kota Batam.

Maka dari itu diperlukan adanya perbentukan kelompok-kelompok pemberdayaan dimasyarakat pesisir (laut) yaitu salah satunya yaitu perbentukan kolompok usaha kebersama (KUBE) bagi para pelaut ataupun nelayan. Praturan Mnteri Sosial Nomor 25 tahun 2015 tentang kelompok usaha bersama yang mana sudah tertuang pada suatu Pasal 1 yang, menetapkan bahwa Kelompok Usaha Bersama yang diubah selanjutnya menjadi KUBE adalah kelompok keluarga kurang mampu (miskin) yang dibentuk, tumbuh serta berkembang atas perakarsanya dalam melaksanakan usaha dalam perekonomian yang productif guna meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu KUBE memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, mengembangkan pelayan sosial dasar, meningkatkan pendapatan nelayan, kapasitas individu, dan serta kemampuan usaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial dimasyarakat.

Table 1.1 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Dinas Perikanan
Tahun 2017-2021 Di Kota Batam

No	Kelompok	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kelompok Usaha Bersama(KUBE)	644	493	680	724	793

Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021.

Data diatas merupakan data dari semua jumlah kelompok usaha perikanan yang berada Di Kota Batam yang Menunjukkan bahwa kelompok usaha meningkat setiap tahunnya.

Adapun program-program Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap
2. Program pengelolaan perikanan budidaya
3. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
4. Program penunjang urusan pemerintah daerah

Program-program tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan serta dapat membantu masyarakat nelayan di Pulau Jaloh dalam meningkatkan perekonomian. Pulau jaloh merupakan salah satu pulau yang ada di kelurahan pantai gelam yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tangkap tradisional dan nelayan budidaya sebagai sumber mata pencaharian sehari-sehari.

Pada saat ini peran Dinas Perikanann Kota Batam belum efektifitas dalam melakukan suatu programs dan menjalankan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir terutama di Pulau Jaloh, dapat dilihat dengan masih terlihat adanya nelayan dan masyarakat yang belum mendapatkan pengawasan serta bimbingan langsung dari dinas terkait dan masih banyak yang belum merasakan program yang telah disalurkan dari pemerintah Kota Batam. Melihat permasalahan itu dinas perikanan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau jaloh dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan, Peningkatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya laut sangat diharapkan mampu diwujudkan oleh Dinas Perikanan Kota Batam.

2. METODOLOGI

Teori yang digunakan yaitu teori peran menurut Mahadam Labolo dengan indikator teori Regulator, Dinamisator dan Fasilitator.¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Peneliti yang digunakan didalam penelitian teknik purpose sampling yang dimana peneliti menentukan informan berdasarkan sampel yang dipilih dari populasi penelitian.²

3. PEMBAHASAN

Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan adalah sebagai sebuah fasilitator yang dilakukan dengan terarah, sistematis, serta berkesinambungan guna membangun kemandirian social, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat. Dimana dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu membantu dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat nelayan. Fungsi pemberdayaan tersebut memberikan peran dan tugas yang sangat penting yang bisa dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Batam guna untuk memberdayakan masyarakat nelayan pesisir, yang berguna sebagai peningkatan suatu perekonomian di masyarakat dan menggalis potensi yang terdapat di suatu daerah tertentu.

Fungsi pemberdayaan ini memberikan peran yang sangat penting yang bisa dilakukan oleh Dinas Perikanan Kota Batam untuk memberdayakan masyarakat nelayan, yang berguna sebagai meningkatkan perekonomian masyarakat dan menggali potensi yang terdapat di suatu daerah.³

Salah satu masyarakat nelayan yang perlu diberdayakan berada di Pulau Jaloh. Untuk memaksimalkan potensi yang ada perlu adanya pemberdayaan yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia, teknologi, serta akses bagian permodalanan. Sebagai Dinas yang mengurus masalah kelautan, peran Dinas Perikanan Kota Batam memiliki andil

¹ William N. Dunn. 2013, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

² Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

³ Sapriadi. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan pesisir guna dalam tercapainya kesejahteraan ekonomi di masyarakat nelayan itu sendiri.⁴

a) Regulator

Regulator yaitu yang mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan. Kaitannya peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di pulau jalloh ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai regulator.

Melalui wawancara dengan dengan kepala dinas perikanan Kota Batam, Bapak Ridwan Afandi, STP, M.Eng mengatakan bahwa:

“Dinas perikanan ini dibentuk pada tahun 2017. Namun kami baru menjalankan programnya ditahun 2018. Aturan dalam menjalankan dinas perikanan ini sudah diatur, hal tersebut sudah mengatur semua hal yang menyangkut pembentukan dinas perikanan dan lain-lain yang menyangkut KUBE kelompok usaha bersama yang dijalankan oleh masyarakat nelayan”

kebijakan yang dipakai Dinas Perikanan dalam pelaksanaan program KUBE ialah Undang-Undang No. 24 tahun 2020 tentang Kesejahteraan masyarakat nelayan, Sedangkan untuk tugas pelaksanaan tugas Dinas Perikanan ialah Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tugas dan Pokok serta Fungsi dari Dinas Perikanan Kota Batam.⁵

Acuan dasar Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021 disusun berdasarkan suatu peraturan menteri no 86 tahun 2016 tentang suatu terlaksananya peraturan pemerintahan dalam no 7 tahun 2008 tentang penyusunan, tata cara tahapan, pengendali dan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan disuatu daerah, dan disesuaikan dengan keputusan Menteri dalam Negeri no 050 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiraann klasifikasi, kodepikasi dan nomenclatur perencanaan suatu pembangunan dan keuangan suatu daerah.⁶

Renstra Dinas Perikanan Kota Batam tahun anggaran 2021 akan menjadi dokumentasi perencanaan daerah yang memiliki periode 1 (satu) tahun anggaran dan

⁴ Kusnadi ,dkk. 2009. 6 Tahun Program PEMP: Sebuah Refleksi. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.

⁵ Undang-Undang No. 24 tahun 2020 tentang Kesejahteraan masyarakat nelayan

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah*

merupakan hasil penjabaran dari program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

b) Dinamisator

Dinas perikanan sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan dorongan bagi masyarakat nelayan untuk bergerak dan ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran dinas perikanan sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat nelayan (KUBE) tanpa melihat perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat.⁷

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Bapak Ridwan Afandi, S,STP,M.Eng mengatakan bahwa:

“Sebagai dinamisator dalam pemerintah disini pastinya sangat berperan penting dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan dengan memberikan bimbingan serta arahan dan juga melakukan pendampingan teknis agar lebih siap dalam menghadapi tantangan pada kedepannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sebagai dinamisator dinas perikanan berperan penting untuk memberikan bimbingan dan arahan langsung kepada masyarakat nelayan (KUBE) khususnya anggota pelaku usaha ekonomi kreatif serta memberikan pendampingan baik itu dalam hal teknis dan evaluasinya.

Pelaksanaan bimbingan dalam suatu usaha pengolahan seta pemasaran dari skala mikro dan kecil merupakan salah satu factor yang sangat menunjang dalam suatu peningkatan hasil produksi dan pembudidayaan pengolah ikan. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan binaan mutu agar proses dan dari hasil produksi terpenuhi standar dan persyaratan. Pelaksanaan pembimbingan pada usaha pengolahan dari hasil tangkapan dan pemasaran skala mikro dan kecil dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table dibawah:

⁷ Ratnawati, E., & Nasehudin. (2019). *Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Membedayakan Ekonomi Kreatif Masyarakat*. Edueksos.

Table 1.1 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Hasil tangkapan Perikanan Yang Mndapatkan Pembinaan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan		20	20	20	20	20

Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021

Dari data diatas dapat di simpulkan bahwa agar meningkatnya ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan hasil tangkapan sangat penting dilakukan untuk peningkatan hasil produksi ikan dan usaha pengolahan hasil tangkapan. Upaya ini dilakukan yaitu dengan cara melakukankan monitorings ketersediaan ikan dan melakukan sosialisasi gemar makan ikan agar konsumsi ikan meningkat drastic dan menjadi pemicu peningkatan produksi usaha pengolah daris jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan pengolahan dari tahun 2018--2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table 1.2 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolhan Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
jumlah peningkatan ketersediaan ikan konsumsi dan usaha pengolahan	2.431.46	2.135.17	4.118.40	201.17	5.300.07

Sumber : Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam memelihara dinamika, pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memberikan arahan dan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa peran Dinas Perikanan melakukan pelatihan itu sama seperti bimbingan yang dilakukan oleh dinas perikanan hanya bersifat sementara

dan tidak berkelanjutan. Pelatihan yang dilakukan dinas perikanan kepada masyarakat nelayan yaitu bagaimana cara mengelola dari hasil tangkap laut nelayan seperti ikan yang dikelola menjadi kerupuk. Seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Pelatihan Pembuatan Kerupuk Ikan



Sumber : dinas perikanan tahun 2021

c) Fasilitator

Fasilitator yaitu perorangan yang membantu sekelompok dalam mencapai tujuan bersama mereka dan membantu membuat perencanaan guna mencapai suatu tujuan tersebut tanpa menguasai posisi tertentu dalam diskusi. Selain itu, fasilitator adalah acuan suatu proses, seorang yang termasuk dalam sebuah proses lebih dan lebih yakin menggunakannya. Sedangkan fasilitas adalah semua sesuatu yang dapat meningkatkan dan memperlancar terlaksananya suatu usaha, berupa benda-benda maupun uang permodalan.

Jumlah sarana dan prasarana alat tangkap sangat mempengaruhi kenaikan jumlah hasil tangkapan, oleh karena itu beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 dalam rangkap peningkatan jumlah alat tangkap melalui kegiatan pengolahan pengolahan ikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis mengenai indikator faslitator tersebut, bersama Bapak Ridwan Afandi, S,STP,M. Eng selaku kepala dinas perikanan Kota Batam. Mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang kami sediakan sebagai pemerintah yaitu menyediakan modal, menyediakan alat tangkap laut serta sarana nelayan yang mereka butuhkan”

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Seman Salam seklau ketua kelompok KUBE mekar jaya, mnegatakan bahwa:

“dari dinas perikanan memang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat nelayan tetapi hanya bersifat sementara tidak secara berkelanjutan”.

Begitu juga hasil wawancara dengan bapak amri dari masyarakat nelayan, mengatakan bahwa:

“Fasilitas seperti alat tangkap untuk sekarang belum adalagi terakhir itu pada tahun 2018”.

Berdasarkan uraian wawancara diatas dijelaskan bahwa Dinas Perikanan Kota Batam menyediakan modal, alat tangkap laut, serta sarana lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan, namun untuk fasilitas seperti alat tangkap laut itu terakhir disalurkan pada tahun 2018 sedangkan untuk sekarang belum ada, jadi menurut penulis untuk dalam hal fasilitator dari dinas perikanan kurang terlaksanakan secara baik, karena fasilitas yang disalurkan hanya bersifat sementara tidak berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Peran dinas perikanan bagian regulator sudah berjalan dengan baik. strategi yang dibuat setiap tahunnya harus sesuai dengan rencana strategi (renstra) Dinas Perikanan. Strategi tersebut berisi perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi KUBE. Strategi yang dibuat pun sudah dipertimbangkan dengan sasaran awal, kendala-kendala yang dialami tahun sebelumnya, anggaran dan SDM yang dimiliki agar strategi ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan pencapaian keberhasilan dan renstra yang telah dibuat serta permasalahan yang sebelumnya terjadi tidak terulang kembali. Agar peranan dari dinas perikanan Kota Batam lebih terarahkan serta lebih maksimal dalam menyelesaikan misi dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir di Kota Batam.
- 2) Peran dinas perikanan Kota Batam sebagai dinamisor yaitu dengan memberikan pelatihan langsung dserta pembimbingan sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat nelayan untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan dari dinas perikanan Kota Batam masih dinilai sangat kurang optimal. Pelatihan ini yang seharusnya dilakukan selama satu (1) bulan sekali namun yang dilakukan dinas perikanan yaitu terakhir pada tahun 2018. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran dari dinas perikanan Kota Batam masih belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

- 3) Peran dinas perikanan Kota Batam pada indikator fasilitator yaitu dengan memberikan alat bantu sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan seperti alat tangkap laut. Pemerintah sebagai fasilitator masih dinilai kurang optimal karena masih banyak masyarakat nelayan (KUBE) belum merasakan bantuan langsung yang disalurkan oleh pemerintah, dan bantuan yang disalurkan masih bersifat semetara tidak berkelanjutan.

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, peneliti memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Diharapkan Dinas Perikanan Kota Batam untuk selalu ber-kontribusi dengan pemerintah yang ada di provinsi dalam menyampaikan permasalahan nelayan yang ada di suatu kecamatan.
- 2) Diharapkan Dinas Perikanan Kota Batam untuk lebih aktif dalam memberikan pembimbingan dan pelatihan langsung kepada nelayan pesisir agar lebih mudah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nelayan dalam hal ilmu pengetahuan maupun teknologi.
- 3) Dan diharapkan dari pihak Dinas Perikanan Kota Batam untuk mensosialiasi dan mendorong betapa penting terbentuknya kelembagaan di masyarakat nelayan untuk wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar-menukar informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat nelayan.
- 4) Untuk nelayan di Pulau Jaloh untuk lebih partisipatif dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah dan selalu aktif dalam menyampaikan pandangan-pandangan terhadap pemberdayaan nelayan.